



Pengendalian Harga Pangan Melalui Penghitungan Indikator Proxy Inflasi

**Nova Puspita Widasari¹, Erwin Tanur²,
Yuliana Ria Uli Sitanggang³, Martina Situmorang⁴**
Badan Pusat Statistik^{1,2,3,4}
novapw@bps.go.id¹, wintanoer@bps.go.id²

Abstract

Handling inflation is the aggregate of central and regional cooperation. So to see the efforts of the local government and the Regional Inflation Control Team in controlling inflation, measurable performance indicators, fast and accurate focus are needed for making policies, programs, and targets. One of them is the index calculated by BPS, namely the Price Development Index. The Price Development Index is one of the Inflation Proxy Indicators in addition to the Price Disparity Index and the Coefficient of Variation of Commodity Price Fluctuations which can test policy-making policies and inflation control programs on the results. This study uses a qualitative descriptive approach with secondary data as sources of data originating from the Ministry of Trade's SP2KP Data, the Ministry of Home Affairs, and the Central Bureau of Statistics. From the research results obtained discussions and studies related to inflation control policies are also presented by comparing the calculation of the Price Development Index, Price Disparity Index, and Coefficient of Variation of Commodity Price Fluctuations with the result that districts/cities with the highest proportion of the increase in the Price Development Index are Nias District, while the decline in prices The highest was in Tebing Tinggi City. The food commodities that experienced the highest price fluctuations were red chilies, shallots, and bird's eye chilies. Red Chili is a commodity whose price fluctuations were quite significant during the third week of March 2023 in nine regencies/cities throughout North Sumatra.

Keywords: price development index, price disparity index, coefficient of variation price fluctuations, inflation

Abstrak

Penanganan inflasi adalah agregat kerja sama pusat dan daerah. Maka untuk melihat upaya pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam pengendalian inflasi, diperlukan indikator kinerja yang terukur, fokus cepat dan akurat untuk pengambilan kebijakan, program dan target. Salah satunya adalah indeks yang dihitung oleh BPS yaitu Indeks Perkembangan Harga. Indeks Perkembangan Harga merupakan salah satu Indikator Proxy Inflasi selain Indeks Disparitas Harga dan Koefisien Variasi Fluktuasi Harga Komoditas yang dapat menguji dampak pengambilan kebijakan dan program pengendalian inflasi terhadap capaian hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa data sekunder yang berasal dari Data SP2KP Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik. Dari hasil penelitian diperoleh pembahasan dan kajian terkait kebijakan pengendalian inflasi juga disajikan dengan membandingkan perhitungan angka Indeks Perkembangan Harga, Indeks Disparitas Harga dan Koefisien Variasi Fluktuasi Harga Komoditas dengan hasil bahwa kabupaten/kota dengan persentase kenaikan Indeks Perkembangan Harga tertinggi adalah Kabupaten Nias, sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kota Tebing Tinggi. Komoditas bahan pangan yang memiliki fluktuasi harga tertinggi adalah cabai merah, bawang merah dan cabai rawit. Cabai Merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama minggu kelima bulan Maret 2023 di sembilan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Kata Kunci: indeks perkembangan harga, indeks disparitas harga, koefisien variasi fluktuasi harga, inflasi

PENDAHULUAN

Sesuai dengan arahan Presiden yang mengharuskan penanganan Inflasi dilakukan secara serempak seperti penanganan COVID-19, saat ini pengendalian Inflasi terus digaungkan di berbagai daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dicanangkan Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) di Kota Malang pada tanggal 10 Agustus 2022.

Gerakan ini adalah suatu komitmen bersama sebagai langkah awal pengendalian inflasi dari sisi persediaan dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara utuh, terintegrasi dan dampaknya dapat dirasakan secara nasional. (Haryono, 2023)

Upaya pengendalian inflasi menjadi sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Syarat pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dilihat dari laju inflasi yang rendah dan stabil serta berkesinambungan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya terdapat enam tantangan global yang dipetakan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam diskusi yang bertajuk Industry Outlook 2023 pada 3 November 2022. Pertama, kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kedua, rantai pasok yang masih terganggu akibat sanksi perang terhadap Rusia dan dampak kebijakan pengendalian covid di China. Ketiga, krisis sejumlah komoditas, terutama pangan dan energi. Keempat berakhirnya suku bunga rendah. Kelima, perbedaan geopolitik yang menguat. Keenam, bergulirnya transisi energi.(York & Kong, 2022)

Situasi global di belahan dunia yang belum pulih akibat pandemi Covid-19, ditambah peristiwa konflik Ukraina-Rusia menyebabkan ancaman inflasi di berbagai negara. Pada Juli 2022, inflasi Indonesia sebesar 4,94 persen (year on year). Bila dibandingkan dengan Uni Eropa dengan inflasi sebesar 8,9 persen, inflasi di Amerika Serikat sebesar 8,5 persen, dan inflasi Turki yang mencapai 79 persen, angka tersebut masih lebih baik. IMF memperingatkan bahwa sepertiga ekonomi global akan mengalami resesi ekonomi pada tahun 2023 karena perekonomian Uni Eropa, Amerika Serikat dan China yang melambat.

Inflasi IHK pada 2022 dan 2023 diprakirakan dapat lebih tinggi dari batas atas sasaran $3,0\pm1\%$ (Bank Indonesia, 2022). Presiden mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama agar inflasi Indonesia dapat terkendali. Pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3 persen dengan harapan seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). (Kementerian Keuangan, 2022).

Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah salah satu data strategis Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pemerintah. Indeks Harga Konsumen juga dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar konsumen. Melalui penghitungan IHK, dapat diketahui perubahan harga dari sekelompok barang/jasa yang umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu akan menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. (BPS, 2022)

Sejak tahun 2020, penghitungan IHK menggunakan tahun dasar 2018 hasil SBH (Survei Biaya Hidup) di 90 kota, yang dinamakan Kota Inflasi. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 416 kabupaten dan 98 kota, maka untuk perhitungan angka Inflasi diluar cakupan Kota Inflasi diperlukan indikator untuk menguji dampak pengambilan kebijakan dan program pengendalian inflasi yang mudah, cepat dan efisien. Oleh karena itu BPS melakukan penghitungan melalui pemanfaatan Indikator Proxy Inflasi yaitu Indeks Perkembangan Harga (IPH), Indeks Disparitas Harga (RPP) dan Koefisien Variasi Fluktuasi Harga Komoditas (CV).

Indeks Perkembangan Harga berperan sebagai *Leading Indicator* dan *Proxy Indicator* dari inflasi. Indeks Perkembangan Harga menjadi sebuah indikator ekonomi yang dapat membantu menunjukkan kemungkinan terjadinya perubahan dimasa mendatang dan dapat memberikan informasi yang mendekati tentang aspek yang ingin diukur. *Leading Indicator* dan *Proxy Indicator* dari Inflasi adalah harga komoditas, daya tukar nilai rupiah terhadap barang (paritas) dan pergerakan harga (fluktuasi).

Direktur Statistik Harga BPS pada tahun 2023 menyampaikan arahannya secara langsung mengenai Indikator Proxy Inflasi, khususnya Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH digunakan untuk mengukur perkembangan harga rata-rata pada tingkat harga yang diterima konsumen dari beberapa komoditas barang yang dikonsumsi dalam suatu periode waktu tertentu. IPH diperoleh dengan menghitung agregat perkembangan harga tertimbang komoditas barang yang telah ditetapkan pada satu wilayah kabupaten/kota dalam rentang waktu lima hari. Manfaat dari IPH adalah untuk mengukur dan menghitung harga keseluruhan dari barang komoditas terpilih yang dikonsumsi di suatu wilayah pada suatu periode amatan.

Komoditas yang terpilih berupa bahan pangan (*volatile food*), karena laju inflasi di suatu tempat berkaitan erat dengan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian bahwa fluktuasi harga pangan menjadi penyumbang inflasi di suatu daerah. Menurut UU No 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, beragam, aman, merata, terjangkau dan bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, agar dapat hidup sehat, produktif dan aktif secara berkelanjutan. Mencermati hal tersebut, maka pengendalian inflasi berkaitan erat dengan kebijakan program ketahanan pangan.

Sumber dan cara pengumpulan data Indikator Proxy Inflasi adalah melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik. Data SP2KP adalah data pencatatan administratif pemantauan Harga Komoditas Dinas Perdagangan Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk memantau data harga harian (5 hari kerja dalam seminggu). Data yang telah diolah menjadi Indeks Perkembangan Harga (IPH), Indeks Disparitas Harga (RPP), dan Koefisien Variasi Fluktuasi Harga Komoditas (CV) tersebut secara rutin disampaikan setiap hari Senin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dihadiri oleh para kepala daerah se-Indonesia dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (Kemendagri, 2022).

Data Indikator Proxy Inflasi ini juga diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi utama khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia membutuhkan data/informasi mengenai perkembangan IPH dan komoditas dengan IPH tertinggi dan terendah sebagai dasar penyusunan asesmen perekonomian regional. Asesmen perekonomian regional tersebut ditujukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi terkini dan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perumusan advisory kepada Pemerintah Daerah. Data tersebut digunakan untuk keperluan asesmen perekonomian Sumatera Utara dari sisi potensi pergerakan tekanan inflasi.

Mengingat pentingnya kajian Indikator Proxy Inflasi seperti yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, dan belum pernah dilakukan kajian terkait hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan disampaikan kajian terkait Indikator Proxy Inflasi khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

KAJIAN LITERATUR

Indeks Harga Konsumen diperoleh dari hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) di Kota Inflasi. SHK meliputi jenis barang maupun jasa dengan merek yang pada umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Data Harga Konsumen diperoleh dari pencacahan responden atau pedagang eceran yang terpilih menjadi sampel. (BPS, 2022)

Indeks Harga Konsumen hanya dihitung pada 90 Kota di Indonesia untuk menghasilkan angka Inflasi. Perhitungan indeks di luar Kota Inflasi, pernah dilakukan oleh Deltha Airuzsh Lubis dan Syifa Fauziah pada tahun 2018 dengan melakukan pendekatan geostatistika yaitu metode Ordinary Point Kriging yang bertujuan untuk memprediksi nilai inflasi di beberapa kabupaten dan kota yang tidak tersampel berdasarkan nilai inflasi kabupaten/kota yang berdekatan. Kedekatan jarak antar kabupaten/kota turut mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat inflasi. (Lubis dkk., t.t.)

Penelitian mengenai Analisis Pengendalian inflasi di DKI Jakarta menitikberatkan pada koordinasi antar pemangku kepentingan pengendalian inflasi, dengan program utamanya adalah upaya pengendalian harga pangan (*volatile food*) yang menyumbang inflasi cukup besar. Fokus yang cukup penting adalah pengendalian harga pangan kelompok inti dan kelompok *administered prices*. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi adalah harga komoditi kebutuhan pangan masyarakat. (Yurianto, 2020)

Alvika & Febrina Harahap, t.t. melakukan penelitian tentang pengaruh harga pangan terhadap inflasi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengolahan uji t-statistik diperoleh harga bawang merah, cabai merah, dan beras berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai $P<0,05$. Harga bawang merah dan cabai merah berpengaruh positif, sedangkan harga beras berpengaruh negatif. Perkembangan harga pangan di Provinsi Sumatera Barat terus meningkat dari bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2021. Agar laju kenaikan inflasi di Provinsi Sumatera Barat dapat terkendali, pemerintah disarankan melakukan perbaikan sistem produksi, kelancaran distribusi dan kegiatan pasar murah. Bagi masyarakat dan pelaku usaha penyediaan bahan pangan untuk tidak menimbulkan barang yang dapat mengakibatkan naiknya harga pangan.

Penelitian mengenai pengaruh harga komoditas pangan terhadap inflasi juga dilakukan oleh Chintia & Destiningsih, 2022 di Kota Semarang. Hasilnya bahwa cabai merah adalah komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi yaitu sebesar 17,39 persen. Belum adanya bahan pangan lain yang mensubstitusi kebutuhan cabai merah menyebabkan tingginya permintaan masyarakat, juga pengaruh pelaku usaha industri dalam pengadaan bahan baku.

Menurut Setiawan & Hadianto (Ekonomi Pertanian dkk., 2014), Kelompok bahan pangan menjadi penyumbang inflasi yang cukup tinggi di Provinsi Banten, akibat besarnya permintaan masyarakat terhadap bahan pangan sehingga harga menjadi fluktuatif. Pada tahun 2010-2014 terjadi inflasi pada kelompok bahan makanan sebesar 12,63 persen.

Analisis Disparitas Harga dan Korelasi terhadap Dana Desa: Studi Kasus Bawang Merah dan Cabai Merah (Panjaitan dkk., 2019) menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan harga antar provinsi masih terjadi, terutama di wilayah timur dan barat. Disparitas harga mengindikasikan adanya sistem manajemen pasokan yang kurang baik, terutama permasalahan distribusi pasokan dari sentra produksi ke daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing daerah. Permasalahan lainnya adalah kendala jauhnya jarak besarnya biaya logistik dari sentra produksi ke seluruh wilayah-wilayah di pelosok, kondisi infrastruktur yang belum memadai serta masih minimnya teknologi untuk memperpanjang masa simpan sebelum sampai ke tangan konsumen.

Besarnya pengaruh perubahan harga pangan terhadap inflasi di Kota Medan pernah diteliti oleh Maryunianta, 2020 dengan menggunakan data time series periode Januari 2014 hingga Agustus 2019 berupa perkembangan harga pangan bulanan. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis VAR atau VECM. Hasil penelitian menunjukkan terdapat satu variabel yang mempengaruhi inflasi yaitu cabai merah dalam jangka panjang.

Dengan adanya supporting data oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah berupa harga yang rutin disajikan dalam aplikasi SP2KP, maka prediksi nilai inflasi (proxy inflasi) akan lebih mudah diperoleh. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan indeks yang mencerminkan kondisi harga pangan di suatu wilayah, Badan Pusat Statistik mengeluarkan Indikator Proxy Inflasi, yaitu Indeks Perkembangan Harga (IPH), Indeks Disparitas Harga (RPP), dan Koefisien Variasi Fluktuasi Harga Komoditas (CV) yang perhitungannya baru dilakukan mulai bulan Oktober pada minggu keempat tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah teknik analisis data statistik yang digunakan dengan menyederhanakan, mendeskripsikan serta menyajikan data sampel ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami seperti grafik, tabel atau diagram, sehingga dapat menjelaskan karakteristik suatu data. Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah gabungan dari teknik analisis data deskriptif dan kualitatif. Analisis deskriptif dianggap lebih luas daripada metode kuantitatif lainnya, terutama untuk mengumpulkan informasi yang

menggambarkan suatu relasi. Kelebihan dari pengolahan data deskriptif dianggap lebih berguna untuk mengidentifikasi variabel dan hipotesis baru yang dapat dianalisis lebih lanjut melalui studi eksperimental dan inferensial sehingga memberi fleksibilitas kepada peneliti untuk menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dan menemukan sifat-sifat populasi. (*Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif*, t.t.)

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder series mingguan yang dimulai dari minggu keempat bulan Oktober 2022 hingga minggu kelima bulan Maret 2023. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Paparan Rakor Pengendalian Inflasi dan Media Massa baik cetak maupun elektronik dan data dari SP2KP Kementerian Perdagangan yang bisa dibagipakaikan melalui <https://ews.kemendag.go.id>

INDIKATOR PROXY INFLASI

Untuk menyusun sebuah Indikator Proxy Inflasi, BPS telah melalui suatu proses bisnis penyusunan Indikator Proxy yang dimulai dari mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan pemantauan harga Kementerian Perdagangan. Selanjutnya dilakukan penyusunan indikator dengan metode Indeks Harga Konsumen yang disederhanakan dan menggunakan bobot *sister city* untuk dua puluh komoditas terpilih. Tahapan berikutnya adalah proses pengolahan data dan analisis serta penyajian dan evaluasi. Indikator proxy inflasi yang dihasilkan melalui tahapan tersebut adalah Indeks Perkembangan Harga (IPH), Indeks Disparitas Harga (RPP), dan Koefisien Variasi Fluktuasi Harga Komoditas (CV).

A. Indeks Perkembangan Harga

Indeks Perkembangan Harga adalah penyederhanaan dari IHK. Komoditas terpilihnya dibatasi hanya yang bisa dikendalikan dalam jangka pendek. Bobotnya meminjam bobot IHK dengan pendekatan *Sister City* dan dapat digunakan sebagai pembanding terhadap IHK BPS khususnya untuk kelompok bahan makanan. IPH 20 komoditas menggunakan metode indeks Laspeyres yang menggunakan bobot NK SBH yang distandardkan.

$$IPH_t = \frac{\sum_i^n \frac{P_{ti}}{P_{t-1}} P_{t-1} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^n P_{0i} Q_{0i}} \times 100\%$$

$$Growth\ IPH = \frac{IPH_t - IPH_{t-1}}{IPH_{t-1}} \times 100\%$$

i = Jumlah komoditas, dipilih sebanyak 20 komoditas. Bobot komoditas pada wilayah yang bukan kota IHK menggunakan metode *sister city*

t = periode minggu ke-t

Cakupan dari perhitungan IPH ini adalah 20 komoditas terpilih yang dilaksanakan serentak di 34 Provinsi dan 424 kabupaten/kota berupa data harga harian (kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari Libur). Pemilihan pasar dilakukan oleh Dinas Perdagangan kabupaten/kota.

Sumber Data perhitungan IPH diperoleh dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari Inspektorat Wilayah dari Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditunjuk, SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Bobot Nilai konsumsi Barang dari SBH2018 dari BPS sebagai penimbang indeks.

Dua puluh komoditas terpilih itu antara lain beras (medium per kg), mie instan (Indomie kari ayam, jika tidak ada varian kuah lainnya), tepung terigu (protein sedang segitiga biru per kg), daging ayam ras (broiler per kg), daging sapi (paha belakang per kg), ikan kembung (kg), udang (sedang per kg), telur ayam ras (ayam broiler per kg), susu bubuk (Dancow Vanilla 400 gram), susu bubuk balita (Frisian Flag 123 Vanilla/SGM 400 gram), tahu mentah (tahu putih per kg), jeruk (lokal per kg), pisang (Ambon per kg), bawang merah lokal (kg) bawang putih Honan (kg), cabai merah besar dan keriting (kg), cabai rawit merah (kg), minyak goreng (curah, kemasan sederhana, dan kemasan premium) per liter, gula pasir curah (kg) dan tempe (kg).

B. Indeks Disparitas Harga

Indeks Disparitas Antar Wilayah digunakan untuk melihat perbandingan relative harga komoditas yang sama dan dikompositkan dengan bobot NK untuk menilai perbandingan harga agregat antara daerah dengan rata-rata nasional. (Aten dkk., 2006)

Indeks Disparitas Harga merupakan adopsi metode pengukuran oleh *Bureau of Economics Analysis (BEA)* sebagai pelengkap dari *Consumer Price Index (CPI)*. Indeks Disparitas Harga merupakan indikasi perbedaan level harga antar wilayah dalam satu waktu. Dapat diukur dengan *single commodity* maupun secara komposit. Indeks Disparitas Harga merupakan indikator untuk menunjukkan tinggi atau rendahnya level harga sebagai dampak dari rendah dan tingginya demand dan supply dengan penggunaan bobot yang menunjukkan demand.

$$RPP_{jt} = \sum_{i=A}^F w_{ij} PH_{ijt}$$

$$PH_{ijt} = \frac{p_{ijt}}{\bar{P}_{jt}}$$

$$w_{ijt} = \frac{NK_{ijt}}{\sum_{i=A}^F NK_{ijt}}$$

Keterangan:

j = kabupaten/kota

i = komoditas terpilih

t = periode bulan ke-t

C. Koefisien Variasi Fluktuasi Harga Komoditas (CV)

Koefisien Variasi Fluktuasi Harga digunakan untuk melihat fluktuasi harga dalam seminggu pada satu komoditas untuk kemudian dinilai mana yang paling berfluktuasi. Koefisien Variasi Fluktuasi Harga Komoditas (CV) banyak digunakan untuk analisis fluktuasi harga dan tren harga pada data time series. Gunanya untuk membandingkan derajat variasi antar waktu dan untuk menentukan seberapa besar volatilitas harga.

$$CV_{ijt} = \frac{s_{ijt}}{\bar{x}_{ijt}} * 100$$

$$s_{ijt} = \sqrt{\frac{\sum (x_{hijt} - \bar{x}_{ijt})^2}{H-1}}; \bar{x}_{ijt} = \frac{\sum x_{hijt}}{H}$$

Komoditas paling bergejolak pada kabupaten/kota j periode t

$$\max(CV_{1jt}, CV_{2jt}, \dots, CV_{20jt})$$

Keterangan:

i = komoditas (i: 1,2, ..., 20)

j = kabupaten/kota j

t = periode ke-t (mingguan)

h = hari (untuk mingguan h = 1,2, ..., 5)

H = jumlah total hari

X = harga komoditas

CV_{ijt} = koefisien variasi komoditas i, di kota j, periode t

S_{ijt} = standar deviasi komoditas i, di kota j, periode t

X_{ijt} = rata-rata komoditas i, di kota j, periode t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten kota, lima diantaranya adalah kota IHK, sehingga IPH tidak dihitung di wilayah tersebut dengan peta yang ditandai warna putih yaitu Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli. Perhitungan IPH dilakukan di 26 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Secara spasial, distribusi Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Sumatera Utara pada minggu kelima bulan Maret 2023 sebarannya sudah hijau artinya persentase perubahan IPH pada periode tersebut di bawah angka nol atau negatif.

Ada 22 kabupaten kota yang berwarna hijau muda yaitu Nias, Labuhanbatu Utara, Batu Bara, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, Nias Barat, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Nias Utara, Labuhanbatu, Binjai, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Simalungun, Karo, Samosir, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Asahan dan Dairi dengan nilai persentase perubahan IPH antara -4% > % perubahan IPH > 0, sedangkan Tanjungbalai, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal dan Tebing Tinggi nilai persentase perubahan IPH nya di bawah -4%. Tebing Tinggi nilai persentase perubahan IPH yang paling rendah se-Sumatera Utara yaitu sebesar -7,52 persen. Wilayah Langkat baru melaksanakan pendataan bulan Maret 2023, sehingga belum bisa dihitung nilai IPH nya sedangkan Tapanuli Selatan belum melaksanakan pendataan harga untuk SP2KP.



Gambar 1. Peta Tematik Persentase Perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Minggu Kelima Bulan Maret 2023

Sumber: Data BPS, 2023

Tabel 1. Kabupaten/kota dengan Persentase Perubahan Indeks Perkembangan Harga (penurunan harga) tertinggi di Sumatera Utara pada Minggu Kelima Bulan Maret 2023

No	Kabupaten/kota	% IPH	Komoditas Andil Perubahan harga (penurunan)
1	Tebing Tinggi	-7,52	cabai merah (-4,155); beras (-1,272); jeruk (-1,034)
2	Mandailing Natal	-5,41	cabai merah (-2,575); beras (-2,139); bawang merah (-0,416)
3	Tapanuli Tengah	-5,32	cabai merah (-5,207); telur ayam ras (-0,211); bawang merah (-0,184)
4	Tanjungbalai	-4,94	cabai merah (-3,398); beras (-0,749); bawang merah (-0,746)
5	Dairi	-3,94	cabai merah (-3,854); minyak goreng (-0,793); gula pasir (-0,209)

Pada minggu kelima bulan Maret atau bertepatan pada pertengahan bulan Ramadhan, penurunan harga tertinggi terjadi di Tebing Tinggi dengan nilai IPH sebesar -7,52 persen dengan komoditas andil perubahan harga berupa turunnya harga cabai merah, beras dan jeruk. Penurunan harga tertinggi selanjutnya adalah di Mandailing Natal sebesar -5,41 persen dengan cabai merah, beras dan bawang merah sebagai komoditas yang tertinggi andil perubahan harganya. Tapanuli Tengah, Tanjungbalai dan Dairi mempunyai perubahan persentase perubahan IPH sebesar -5,32 persen, -4,94 persen dan -3,94 persen. Komoditas andil perubahan harga (penurunan) tertinggi terjadi pada komoditas cabai merah. Tren penurunan yang dialami pada harga cabai merah tersebut disebabkan melimpahnya pasokan cabai seiring di sejumlah daerah Sumatera Utara yang sedang memasuki musim panen.

Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah

Tingkat disparitas dapat dilihat dari selisih antara rata-rata harga di masing-masing kabupaten kota dengan rata-rata harga di tingkat nasional. Apabila nilai indeksnya di bawah 100, maka dapat disimpulkan bahwa harga di wilayah tersebut lebih rendah dari rata-rata nasional, sedangkan apabila nilai indeks di atas 100 maka harga di wilayah tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Tabel 2. Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah Terendah di Provinsi Sumatera Utara (Maret 2023)

No	Variabel	Indeks
1	Labuhanbatu	63,5
2	Tapanuli Tengah	77,0
3	Tanjung Balai	87,1
4	Asahan	88,0
5	Pakpak Bharat	89,1

Sumber: BPS, 2023

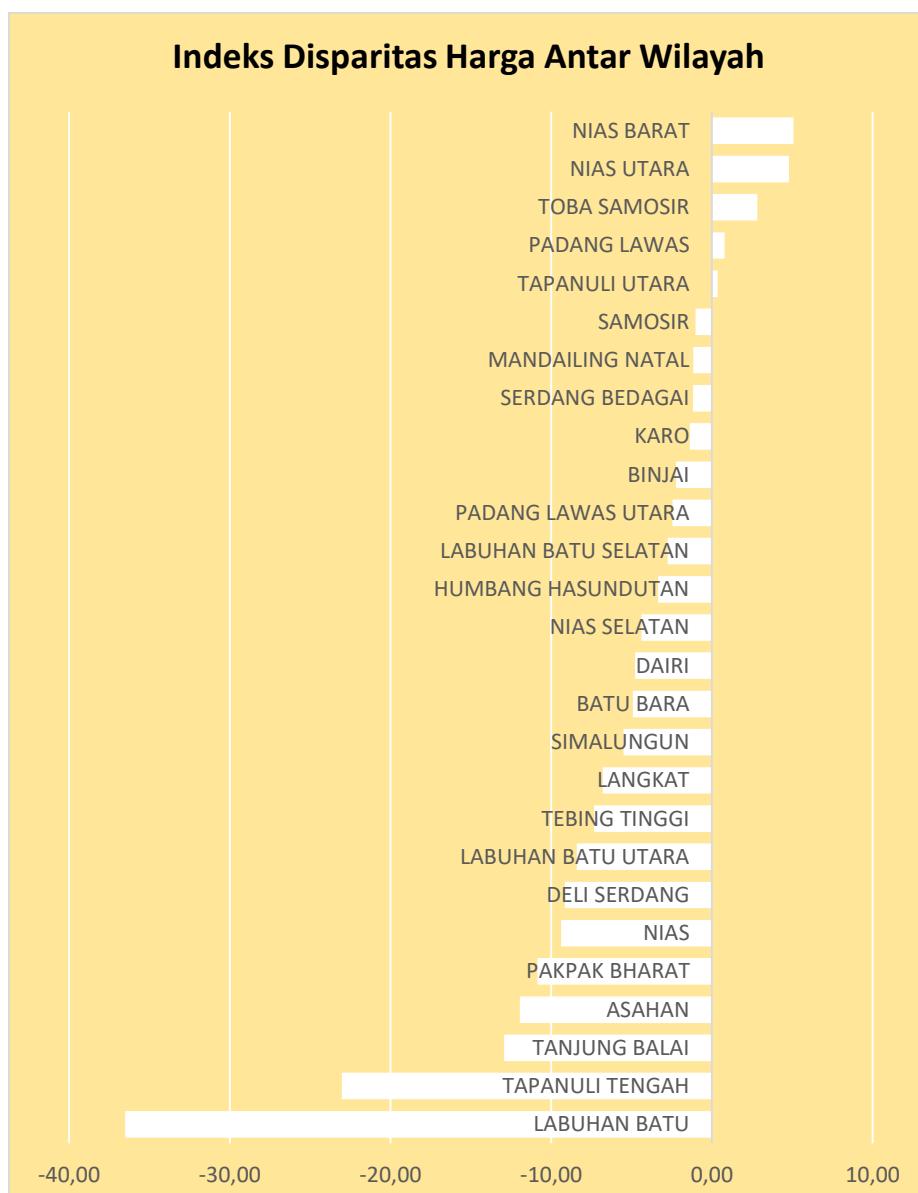
Lima kabupaten/kota di Sumatera Utara yang rata-rata harganya lebih rendah dari rata-rata nasional adalah Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tanjung Balai, Asahan, dan Pakpak Bharat.

Tabel 3. Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah Tertinggi di Provinsi Sumatera Utara (Maret 2023)

No	Variabel	Indeks
1	Nias Barat	105,1
2	Nias Utara	104,8
3	Toba	102,8
4	Padang Lawas	100,8
5	Tapanuli Utara	100,4

Sumber: BPS, 2023

Lima kabupaten/kota di Sumatera Utara yang rata-rata harganya lebih tinggi dari rata-rata nasional adalah Nias Barat, Nias Utara, Toba, Padang Lawas, dan Tapanuli Utara.



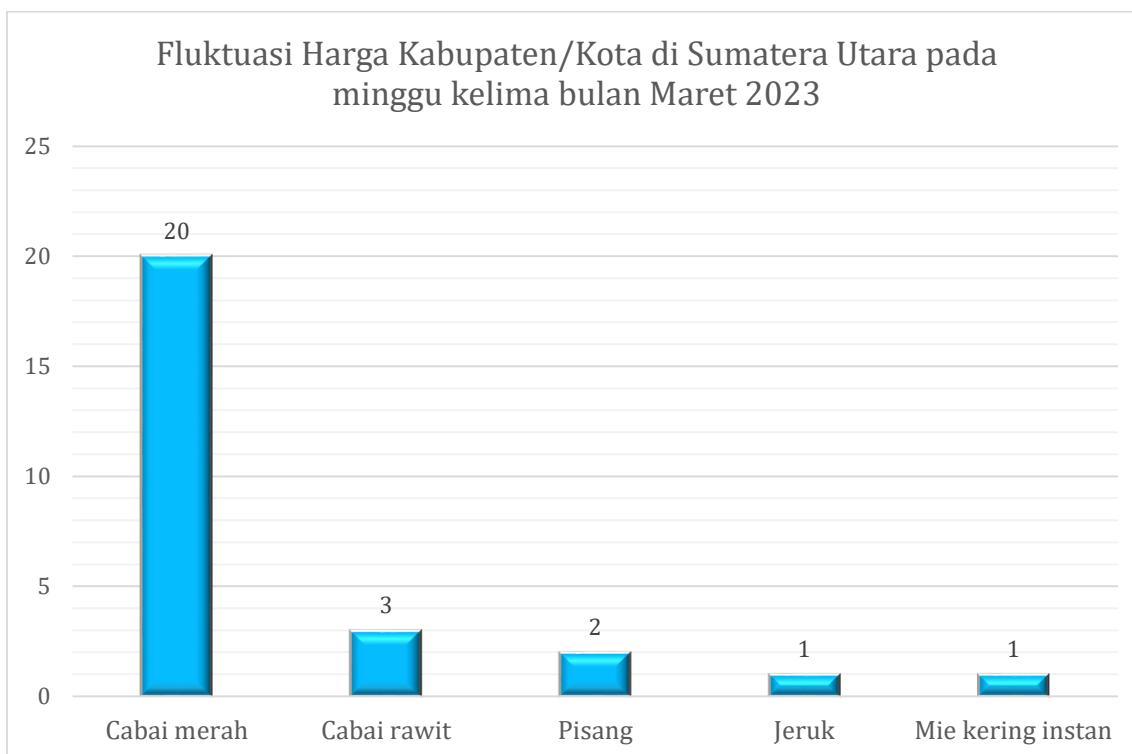
Gambar 2. Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara pada minggu kelima bulan Maret 2023

Sumber: Data BPS, 2023

Fluktuasi Harga Komoditas Bahan Pangan Tertinggi pada minggu kelima bulan Maret 2023.

Komoditas bahan pangan yang memiliki fluktuasi harga tertinggi pada minggu kelima bulan Maret 2023 adalah cabai merah, cabai rawit dan pisang. Cabai merah adalah komoditas yang harganya cukup fluktuatif selama minggu kelima bulan Maret 2023. Fluktuasi harga cabai merah terjadi di dua puluh kabupaten/kota yaitu di Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Nias Barat, Tanjung Balai dan Binjai. Sementara fluktuasi harga cabai rawit terjadi di tiga kabupaten/kota yaitu Tapanuli Utara, Toba dan Langkat.

Komoditas pisang fluktuasi harganya terjadi di dua kabupaten/kota yaitu Labuhanbatu Utara dan Nias Utara, sedangkan di Nias Selatan, komoditas yang berfluktuasi adalah mie kering instan, sementara di Tebing Tinggi terjadi fluktuasi harga jeruk.



Gambar 3. Fluktuasi Harga pada Minggu Kelima Bulan Maret 2023
Sumber: Data BPS, 2023

KESIMPULAN

Indeks Perkembangan Harga (IPH), Indeks Disparitas Harga (RPP), dan Koefisien Variasi Fluktuasi Harga Komoditas (CV) merupakan indikator proxy inflasi. Meskipun proxy paling sederhana dari IHK dan merupakan *additional statistics*, Indeks Perkembangan Harga (IPH) telah digunakan sebagai indikator untuk memantau kinerja pengendalian inflasi daerah khususnya pada 20 komoditas bahan pangan terpilih dan digunakan oleh Kemendagri dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah setiap hari Senin

IPH sebagai leading indikator digunakan untuk mengukur kinerja upaya pengendalian inflasi daerah pada komoditas pangan (*volatile food*) yang harganya dipengaruhi banyak

faktor. Kebijakan daerah setempat perlu didukung dengan upaya untuk menjamin pasokan dan stok dari pasokan daerah sentra dan dalam distribusi arus barangnya.

Pada minggu kelima bulan Maret 2023, kondisi IPH di Sumatera Utara cukup baik, hanya Tebing Tinggi yang perlu mendapat perhatian karena persentase penurunan IPH yang cukup tinggi. Untuk harga komoditas cabai merah, cabai rawit dan pisang perlu dikendalikan karena harga yang sangat fluktuatif dan cukup dominan di beberapa kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Pentingnya pengendalian harga pangan yang berfluktuatif akan mampu meredam tingkat inflasi yang tinggi. Disparitas harga antar wilayah akibat ketidakmerataan pasokan, gap sentra produksi dan terhambatnya distribusi juga harus dikurangi.

SARAN

Saat ini IPH masih dalam kajian, agar permintaan penghitungan inflasi di kota non IHK dapat terpenuhi. Angka IPH masih belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan belum memahami arti angka-angka tersebut. BPS Provinsi dan kabupaten/kota agar membantu memberikan penjelasan mengenai IPH kepada pemerintah daerah masing-masing. BPS kabupaten/kota dapat melakukan pembinaan kepada Dinas Perdagangan atau OPD yang menangani data harga dan mencermati komoditas terpilih sehingga kualitas data harga yg diinput dapat terjamin.

Masih ada kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pendataan 20 komoditas di SP2KP, Pemerintah Daerah agar memberikan dorongan dan arahan terkait hal tersebut dengan meningkatkan koordinasi TPID, Satgas pangan dan stakeholder lainnya.

Sesuai dengan arahan Presiden untuk mengendalikan inflasi, agar pemerintah daerah memantau langsung harga di lapangan. Beberapa aksi yang dapat dilakukan dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi diantaranya adalah melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan, pelaksanaan gerakan pangan murah, monitoring setiap minggu pada pasar tradisional dan modern, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan distributor pangan serta perlunya diversifikasi pangan.

Perlunya penelitian lebih lanjut yang membahas Indeks Perkembangan Harga dan tingkat perekonomian di Sumatera Utara serta hubungan IPH di kota satelit Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Alvika, P., & Febrina Harahap, E. (t.t.). *ANALISIS PENGARUH HARGA PANGAN TERHADAP INFLASI DI PROVINSI SUMATERA BARAT*.

Aten, B. H., Figueira, E. B., & Martin, T. M. (2006). *Regional Price Parities for States and Metropolitan Areas, 2006-2010*. www.bls.gov/cpi.

Bank Indonesia. (2022). *Analisis Inflasi Agustus 2022*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Analisis-Inflasi-TPIP-Agustus-2022.aspx>

BPS. (2022). *IHK 90 Kota di Indonesia 2021*.

Chintia, R. A., & Destiningsih, R. (2022). PENGARUH HARGA KOMODITAS PANGAN TERHADAP INFLASI DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(2), 244–258. <https://doi.org/10.35760/eb.2022.v27i2.4948>

Ekonomi Pertanian, J., Dan Lingkungan, S., Febriani Setiawan, A., & Adi Hadianto, dan. (2014). *Food Prices Fluctuation and its Impact to Inflation in Banten Province*.

Haryono, E. (2023). *Sinergi Gernas Pengendalian Inflasi Pangan untuk Perkuat Pengendalian Inflasi Nasional*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2421022.aspx

Kemendagri. (2022, Maret 22). *Rakor Pengendalian Inflasi Daerah* . <https://www.youtube.com/watch?v=GNKKRG-ueBo>

Kementerian Keuangan. (2022). *Buka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Presiden Ingatkan Jajaran untuk Bekerja Sama*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Presiden-Ingatkan-Jajaran-untuk-Bekerja-Sama>

Lubis, D. A., Fauziah, S., Pusat, B., Kabupaten, S., Selatan, T., Provinsi, S., & Barat, J. (t.t.). *METODE ORDINARY POINT KRIGING UNTUK MEMPREDIKSI INFLASI DI KABUPATEN/ KOTA YANG TIDAK TERSAMPEL*. 2, 36–48. www.databank.worldbank.org

Maryunianta, Y. (2020). Pengaruh Harga Komoditi Pangan Terhadap Inflasi Di Kota Medan. *Jurnal Agribisnis Sumatera Utara*, 13(1). <https://doi.org/10.31289/agrica.v13i1.3121.g2518>

Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif. (t.t.). Diambil 22 Maret 2023, dari <https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>

Panjaitan, D. V., Novianti, T., Fazri, M., Retno, S., & Nugraheni, W. (2019). *Analisis Disparitas Harga dan Korelasi terhadap Dana Desa: Studi Kasus Bawang Merah dan Cabai Merah*. 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.2944/jekp.8.1.1-19>

UU No 18 Tahun 2012, UU No 18 Tahun 2012 (2021).

York, N., & Kong, H. (2022). *Industry outlook 2023*. www.eiu.com.

Yurianto, H. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DKI JAKARTA. *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, XVII(1).

SERIES INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH)
M4 OKTOBER 2022 – M4 JUNI 2023

Kode	Kab/Kota	2022										
		Okt	Nov					Des				
			M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M5
1201	NIAS	5.56	-5.98	-2.04	-0.11	-0.77	-1.06	0.82	2.12	1.62	4.88	
1202	MANDAILING NATAL	3.05	6.25	-0.30	-0.41	0.42	-1.28	-0.41	0.25	-0.11	-0.24	
1203	TAPANULI SELATAN	0.28	-0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	
1204	TAPANULI TENGAH	-5.89	6.36	-0.40	-0.39	-0.17	-0.04	-0.22	2.27	2.34	2.11	
1205	TAPANULI UTARA	-6.01	13.63	0.37	-1.06	-0.26	-1.13	1.06	2.25	2.68	3.65	
1206	TOBA SAMOSIR	-6.35	7.15	-0.07	-0.01	0.56	-0.10	1.40	0.32	2.69	2.78	
1207	LABUHAN BATU	0.36	-1.64	1.21	-0.21	0.21	-1.00	1.58	1.10	3.08	2.04	
1208	ASAHDAN	4.30	-2.29	0.20	-0.41	0.13	2.05	1.24	0.94	5.57	4.55	
1209	SIMALUNGUN	3.80	-1.20	-0.34	0.70	0.33	1.42	0.55	0.66	3.08	1.20	
1210	DAIRI	0.54	0.10	0.94	1.00	0.44	0.57	-0.11	0.69	2.56	1.34	
1211	KARO	8.64	-12.94	-0.32	0.03	0.61	1.55	1.12	0.46	5.15	4.07	
1212	DELI SERDANG	-4.54	6.96	-0.60	0.45	0.39	0.55	0.02	0.36	2.30	0.90	
1213	LANGKAT	-0.79	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	
1214	NIAS SELATAN	2.04	-2.96	-0.49	-0.58	-0.20	0.69	0.88	0.74	2.54	3.87	
1215	HUMBANG HASUNDUTAN	11.77	-9.47	0.08	-0.17	0.13	0.46	0.58	1.34	3.42	2.81	
1216	PAKPAK BHARAT	-4.69	10.33	0.06	0.00	0.37	1.18	0.67	0.09	3.79	1.77	
1217	SAMOSIR	2.68	-3.94	-0.43	-0.28	-0.15	1.09	0.73	-0.03	2.36	2.79	
1218	SERDANG BEDAGAI	3.89	-4.67	-1.21	0.27	0.92	2.10	-0.48	-0.06	3.66	3.23	
1219	BATU BARA	-3.37	3.49	-0.35	-0.17	0.98	0.90	-0.30	1.24	4.53	4.63	
1220	PADANG LAWAS UTARA	-1.84	1.72	-0.50	0.09	0.60	0.69	-0.37	-0.09	2.20	2.99	
1221	PADANG LAWAS	6.15	-13.05	0.38	-0.09	0.33	1.11	0.03	1.02	3.52	2.53	
1222	LABUHAN BATU SELATAN	7.15	-5.52	-0.47	-0.59	-0.35	0.46	1.96	1.66	3.56	3.58	
1223	LABUHAN BATU UTARA	-2.73	8.17	-2.91	-1.55	-0.83	-1.31	0.72	0.75	-1.13	2.23	
1224	NIAS UTARA	-7.94	8.18	-0.72	-1.08	-0.53	1.20	1.06	1.34	3.84	6.36	
1225	NIAS BARAT	6.12	-8.38	-0.19	1.61	1.01	0.92	-0.45	-0.69	2.16	1.59	
1272	TANJUNG BALAI	-2.29	9.43	0.39	0.72	0.62	1.00	0.16	0.49	4.33	1.95	
1274	TEBING TINGGI	5.83	-5.83	-0.46	0.46	0.61	-0.41	1.49	1.19	3.53	2.63	
1276	BINJAI	-3.91	4.79	-1.91	-0.36	-0.24	-2.85	1.45	1.59	-1.02	-2.29	

SERIES INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH)
M4 OKTOBER 2022 – M4 JUNI 2023

Kode	Kab/Kota	2023							
		Jan				Feb			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1201	NIAS	3.42	5.53	7.67	8.55	-6.61	-6.35	-5.62	-5.08
1202	MANDAILING NATAL	3.87	5.88	6.10	6.93	4.69	4.16	3.09	2.95
1203	TAPANULI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	TAPANULI TENGAH	1.91	4.88	4.70	5.37	6.05	4.55	3.62	4.05
1205	TAPANULI UTARA	-1.37	0.72	1.00	1.51	3.67	2.91	1.40	1.27
1206	TOBA SAMOSIR	-1.33	3.00	3.44	3.71	1.95	2.20	1.59	1.51
1207	LABUHAN BATU	0.43	4.29	3.91	3.89	0.17	-0.43	-0.73	-0.36
1208	ASAHDAN	-1.41	2.40	2.87	2.78	2.73	1.83	0.72	1.11
1209	SIMALUNGUN	-2.37	-1.13	-1.06	-1.03	4.13	4.63	4.61	4.93
1210	DAIRI	-0.69	1.32	1.20	1.57	3.17	3.47	3.22	3.81
1211	KARO	-4.30	0.56	1.03	1.37	2.00	2.09	2.20	2.51
1212	DELI SERDANG	0.85	2.17	1.86	2.27	4.15	3.61	3.30	3.34
1213	LANGKAT	-	-	-	-	-	-	-	-
1214	NIAS SELATAN	1.34	4.99	4.67	5.91	1.61	1.53	0.97	0.75
1215	HUMBANG HASUNDUTAN	-3.32	-0.33	0.04	0.10	1.49	1.76	1.41	1.53
1216	PAKPAK BHARAT	-2.21	0.13	0.13	0.29	0.70	1.14	0.98	1.15
1217	SAMOSIR	-1.52	0.53	0.53	0.34	1.30	1.38	1.29	1.44
1218	SERDANG BEDAGAI	0.47	4.14	3.51	3.14	1.06	0.77	0.43	0.63
1219	BATU BARA	-3.55	0.89	0.79	0.77	1.07	1.57	1.72	2.31
1220	PADANG LAWAS UTARA	0.10	3.26	2.32	2.03	2.25	2.44	2.44	2.50
1221	PADANG LAWAS	-2.33	1.79	2.57	2.66	2.89	3.41	2.78	2.10
1222	LABUHAN BATU SELATAN	0.50	2.70	2.93	2.92	2.59	2.67	3.00	3.06
1223	LABUHAN BATU UTARA	5.23	5.97	6.49	5.32	-1.18	-0.19	-0.43	-1.36
1224	NIAS UTARA	2.60	8.73	7.07	6.00	-2.41	-2.53	-3.68	-4.14
1225	NIAS BARAT	2.45	9.81	9.30	8.93	-2.98	-1.86	-2.61	-3.71
1272	TANJUNG BALAI	-2.23	2.04	2.45	2.73	2.54	2.17	2.13	1.99
1274	TEBING TINGGI	-1.33	2.97	3.72	3.88	4.02	3.26	2.30	2.20
1276	BINJAI	2.92	0.00	-	1.35	2.09	3.60	3.69	4.13

SERIES INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH)
M4 OKTOBER 2022 – M4 JUNI 2023

Kode	Kab/Kota	2023							
		Mar					Apr		
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M4
1201	NIAS	4.81	3.99	3.86	2,39	-0,07	-9.518	-9.835	-9.453
1202	MANDAILING NATAL	-1.90	-3.23	-4.40	-4,85	-5,41	-2.296	-1.794	-1.857
1203	TAPANULI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	TAPANULI TENGAH	1.24	-0.53	-0.53	-1,25	-5,32	-	-4.461	-5.234
1205	TAPANULI UTARA	-1.77	-2.40	-2.19	-2,20	-2,91	-1.656	-0.923	-1.239
1206	TOBA SAMOSIR	-0.71	-1.85	-1.95	-2,04	-2,83	-2.623	-1.903	-2.530
1207	LABUHAN BATU	0.55	-0.78	-1.21	-1,63	-3,01	-4.499	-4.499	-4.499
1208	ASAHDAN	0.24	-0.69	-1.94	-2,54	-3,80	-4.791	-4.471	-4.399
1209	SIMALUNGUN	-2.14	-2.46	-3.16	-2,94	-3,17	0.673	-1.473	-1.259
1210	DAIRI	-0.15	-2.08	-2.75	-2,98	-3,94	-4.801	-4.334	-4.148
1211	KARO	0.21	-0.51	-1.28	-1,85	-3,22	-4.468	-4.517	-4.624
1212	DELI SERDANG	-1.02	-1.24	-1.85	-2,09	-3,08	-4.796	-4.343	-3.880
1213	LANGKAT	-	-	-	-	-	-2.717	-2.729	-2.515
1214	NIAS SELATAN	-1.91	-1.83	-1.85	-2,18	-3,42	-5.954	-5.270	-5.323
1215	HUMBANG HASUNDUTAN	-0.32	-0.65	-1.33	-1,91	-2,32	-3.157	-2.776	-3.152
1216	PAKPAK BHARAT	1.89	1.90	-0.16	-1,41	-3,78	-3.851	-3.888	-4.219
1217	SAMOSIR	-0.24	-1.68	-2.42	-2,78	-3,35	-1.014	-1.328	-2.001
1218	SERDANG BEDAGAI	0.15	-0.68	-1.59	-2,12	-3,05	-3.645	-4.142	-3.681
1219	BATU BARA	2.47	-0.33	-1.50	-1,97	-2,75	-5.381	-5.381	-5.381
1220	PADANG LAWAS UTARA	-0.82	-0.74	-0.91	-1,33	-2,43	-4.942	-4.919	-5.168
1221	PADANG LAWAS	-1.28	-0.80	-1.26	-1,62	-2,39	-2.787	-2.348	-2.212
1222	LABUHAN BATU SELATAN	-0.09	-0.72	-1.33	-1,59	-2,81	-6.065	-5.943	-5.351
1223	LABUHAN BATU UTARA	-3.10	-2.99	0.11	0,20	-0,45	-3.748	-3.378	-2.537
1224	NIAS UTARA	-1.27	-2.02	-2.28	-2,37	-2,96	-5.326	-5.010	-4.557
1225	NIAS BARAT	-0.15	-1.09	-1.88	-2,15	-2,77	-1.990	-2.179	-2.132
1272	TANJUNG BALAI	-3.40	-3.38	-3.99	-4,13	-4,94	-4.952	-3.951	-2.985
1274	TEBING TINGGI	-2.85	-4.61	-6.00	-6,38	-7,52	-4.554	-4.631	-4.344
1276	BINJAI	-0.90	-1.57	-2.02	-2,02	-3,02	-	-3.728	-3.728

SERIES INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH)
M4 OKTOBER 2022 – M4 JUNI 2023

Kode	Kab/Kota	2023								
		Mei					Juni			
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4
1201	NIAS	3.241	4.031	4.267	3.910	3.927	-0.524	0.202	-0.252	-0.977
1202	MANDAILING NATAL	0.193	0.663	0.530	-0.397	-0.588	-0.603	1.061	1.878	0.859
1203	TAPANULI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	TAPANULI TENGAH	-	-3.702	-3.702	-3.846	-3.104	1.475	1.789	2.290	0.583
1205	TAPANULI UTARA	-3.286	-2.356	-2.725	-2.714	-2.533	2.662	3.236	2.853	1.462
1206	TOBA SAMOSIR	-1.985	-1.918	-1.814	-1.819	-1.623	1.721	1.743	1.821	0.559
1207	LABUHAN BATU	-	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772	-	-	-	-
1208	ASAHAH	-2.249	-2.138	-2.035	-1.676	-1.103	7.004	8.645	8.507	4.082
1209	SIMALUNGUN	-0.302	-0.233	0.217	0.663	0.996	2.905	3.706	4.402	2.683
1210	DAIRI	0.895	2.082	1.160	1.006	1.076	1.104	1.529	2.355	0.887
1211	KARO	-1.274	-0.955	-0.533	-0.118	0.154	2.553	2.816	3.096	1.610
1212	DELI SERDANG	0.103	1.142	1.353	1.865	2.267	1.536	2.636	2.477	1.453
1213	LANGKAT	-0.384	0.819	1.030	0.733	0.719	-	5.202	5.202	2.523
1214	NIAS SELATAN	-1.220	-0.835	-0.893	-0.564	-0.670	3.411	3.651	3.749	2.009
1215	HUMBANG HASUNDUTAN	-1.609	-2.037	-1.932	-1.442	-1.058	2.034	3.075	3.853	2.422
1216	PAKPAK BHARAT	-2.023	-2.023	-1.633	-1.814	-1.803	0.365	1.309	3.305	1.394
1217	SAMOSIR	-0.167	-1.480	-1.592	-1.324	-1.069	2.752	3.088	3.227	1.161
1218	SERDANG BEDAGAI	0.753	0.551	0.141	0.027	0.097	1.634	2.996	3.551	1.675
1219	BATU BARA	-	1.427	1.427	1.941	2.003	1.803	2.163	2.271	1.234
1220	PADANG LAWAS UTARA	-1.628	-1.644	-1.078	-0.868	-0.647	1.574	1.747	2.035	1.297
1221	PADANG LAWAS	0.678	0.778	0.645	1.005	1.215	1.401	1.757	1.929	1.079
1222	LABUHAN BATU SELATAN	-0.263	0.430	0.665	0.924	1.229	2.771	3.077	3.014	1.517
1223	LABUHAN BATU UTARA	3.326	2.646	2.447	2.444	2.910	2.409	2.572	2.615	1.811
1224	NIAS UTARA	-0.741	-1.336	-1.306	-1.389	-1.536	-0.537	1.836	2.175	1.138
1225	NIAS BARAT	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.0	0.000	0.000	0.000
1272	TANJUNG BALAI	-0.487	0.076	0.288	0.526	0.721	3.173	3.813	3.322	1.590
1274	TEBING TINGGI	-0.171	-0.361	-0.369	-0.018	0.453	3.807	4.827	4.860	2.383
1276	BINJAI	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.000	0.000

Kabupaten/kota dengan Persentase Perubahan Indeks Perkembangan Harga (penurunan harga) tertinggi di Sumatera Utara pada Minggu Kelima Bulan Maret 2023

No	Kabupaten/kota	% IPH	Komoditas Andil Perubahan harga (penurunan)
1	Tebing Tinggi	-7,52	cabai merah (-4,155); beras (-1,272); jeruk (-1,034)
2	Mandailing Natal	-5,41	cabai merah (-2,575); beras (-2,139); bawang merah (-0,416)
3	Tapanuli Tengah	-5,32	cabai merah (-5,207); telur ayam ras (-0,211); bawang merah (-0,184)
4	Tanjungbalai	-4,94	cabai merah (-3,398); beras (-0,749); bawang merah (-0,746)
5	Dairi	-3,94	cabai merah (-3,854); minyak goreng (-0.793); gula pasir (-0.209)
6	Asahan	-3.80	cabai merah(-3,56);udang basah(-0,247);bawang merah(-0,19)
7	Pakpak Bharat	-3.78	cabai merah(-4,088);gula pasir(-0,174);bawang merah(-0,144)
8	Nias Selatan	-3.42	cabai merah(-3,001);beras(-0,53);telur ayam ras(-0,237)
9	Samosir	-3.35	cabai merah(-2,475);beras(-0,584);pisang(-0,564)
10	Karo	-3.22	cabai merah(-3,036);beras(-0,562);minyak goreng(-0,124)
11	Simalungun	-3.17	cabai merah(-2,079);pisang(-0,72);beras(-0,404)
12	Deli Serdang	-3.08	cabai merah(-2,732);bawang merah(-0,31);minyak goreng(-0,132)
13	Serdang Bedagai	-3.05	cabai merah(-2,905);bawang merah(-0,167);telur ayam ras(-0,088)
14	Binjai	-3.02	cabai merah(-1,485);ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso(-0,812);telur ayam ras(-0,506)
15	Labuhanbatu	-3.01	cabai merah(-2,404);bawang merah(-0,515);minyak goreng(-0,341)
16	Nias Utara	-2.96	cabai merah(-3,068);ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso(-0,247);daging ayam ras(-0,182)
17	Tapanuli Utara	-2.91	cabai merah(-1,828);beras(-0,338);susu bubuk untuk balita(-0,328)
18	Toba	-2.83	cabai merah(-2,214);daging ayam ras(-0,623);udang basah(-0,237)
19	Labuhan Batu Selatan	-2.81	cabai merah(-2,854);bawang merah(-0,607);jeruk(-0,514)
20	Nias Barat	-2.77	cabai merah(-2,335);telur ayam ras(-0,348);daging ayam ras(-0,124)

21	Batu Bara	-2.75	cabai merah(-2,123);udang basah(-1,079);bawang merah(-0,465)
22	Padang Lawas Utara	-2.43	cabai merah(-2,908);cabai rawit(-0,223);beras(-0,116)
23	Padang Lawas	-2.39	cabai merah(-1,572);telur ayam ras(-0,69);bawang merah(-0,279)
24	Humbang Hasundutan	-2.32	cabai merah(-2,839);daging ayam ras(-0,759);bawang merah(-0,269)
25	Labuhan batu Utara	-0.45	cabai merah(-1,28);bawang merah(-0,613);tahu mentah(-0,268)
26	Nias	-0.07	bawang merah(-0,397);beras(-0,395);telur ayam ras(-0,267)

Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah

No	Kabupaten/kota	Indeks Disparitas
1	Labuhanbatu	62,54
2	Tapanuli Tengah	77,83
3	Deli Serdang	79,26
4	Dairi	80,00
5	Tanjungbalai	85,59
6	Asahan	89,44
7	Nias	90,88
8	Pakpak Bharat	90,91
9	Batu Bara	92,91
10	Labuhanbatu Utara	95,41
11	Padang Lawas Utara	95,44
12	Simalungun	96,53
13	Tebing tinggi	97,00
14	Humbang Hasundutan	97,30
15	Nias selatan	97,53
16	Labuhanbatu Selatan	99,22
17	Binjai	99,37
18	Serdang Bedagai	99,98
19	Karo	100,52
20	Samosir	100,59
21	Mandailing Natal	100,82
22	Tapanuli Utara	101,65
23	Padang Lawas	101,87
24	Toba	104,41
25	Nias Barat	105,98
26	Nias Utara	106,11

Sumber: BPS, 2023 diolah